

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab kajian teori, dikemukakan teori-teori, hasil pengembangan penelitian terdahulu, dan publikasi umum yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Dalam permasalahan penelitian secara eksplisit memuat variabel-variabel penelitian. Dalam bab ini peneliti mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan variabel-variabel penelitian.

2.1.1 Implementasi *Good Government Governance*

2.1.1.1 Definisi *Good Government Governance*

Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. *Good Government Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011 : 3).

Banyak para ahli memaparkan definisi dari *Good Governance*, yaitu sebagai berikut:

Menurut Mardiasmo (2009) mendefinisikan *Good Governance* yaitu :

“Suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik”.

Pengertian *Good Governance* menurut Sukrisno Agoes (2011:101) :

“Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Definisi dari *Cadbury Committee of United Kingdom* dalam Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana (2011:102) memberi definisi tentang *Good Governance* adalah sebagai berikut :

“A set of rules that define the relationship between stakeholders, managers, creditors, the government, employes, and other internal and external shareholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.”

Kutipan diatas dapat diartikan bahwa *good governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengarahkan dan mengendalikan.

Adapun definisi lain mengenai *Good Governance*, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut *World Bank* dalam Renyowijoyo Muindro (2010) mendefinisikan *good governance* adalah :

“The way statement is used in managing and social resources for development of society.”

Kutipan diatas dapat diartikan bahwa *good governance* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Sementara itu menurut *United Nation Development Program (UNDP)* dalam Renyowijoyo Muindro (2010) mendefinisikan *good governance* adalah :

“The exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels.”

Kutipan diatas dapat diartikan bahwa *good governance* lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan Negara.

Sehingga dapat dilihat bahwa definisi yang dikemukakan menurut *World Bank* lebih pada cara pemerintahan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan menurut UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan Negara. *Politic governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah

pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada system implementasi kebijakan (Mardiasmo, 2009 : 17).

Jika mengacu pada program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan *good government governance*, *World Bank* mendefinisikan *good government governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dengan kerangka politik (*politic framework*) bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009 : 17).

Implementasi *Good Government Governance (GGG)* dalam pemerintah daerah secara sederhana adalah dengan menerapkan prinsip *Good Government Governance (GGG)* ke dalam sistem dan pengelolaan pemerintahan daerah dengan baik dan benar. *Good Government Governance (GGG)* sebagai suatu konsep dalam menjalankan pemerintahan tidak terhenti hanya sampai pemahaman saja, melainkan harus benar-benar diimplementasikan dalam langkah kongkret sehingga dapat memberikan manfaat pada seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan.

2.1.1.2 Prinsip-prinsip *Good Government Governance*

Kunci utama memahami *good government governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dimulai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good government governance*.

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat prinsip-prinsip *good government governance*, sebagai berikut:

- 1) “Akuntabilitas (*Accountability*),
- 2) Transparansi (*Transparency*),
- 3) Demokrasi (*Democratation*),
- 4) Aturan hukum (*Rule Of Law*).”

Penjelasan dari prinsip-prinsip *good government governance*, sebagai berikut:

1) Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan strukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

2) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

3) Demokrasi (*Democratisation*)

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.

4) Aturan hukum (*Rule Of Law*)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) yang disusun Komite Nasional Kebijakan *Governance* dalam Subrayaman dkk (2008), yaitu :

1. “Transparansi (*Transparency*),
2. Akuntabilitas (*Accountability*),
3. Responsibilitas (*Responsibility*),
4. Independensi (*Independency*),
5. kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*).”

Penjelasan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan/ transparansi adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu pemerintahan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah prinsip dimana suatu perusahaan / pemerintahan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu pemerintah harus dikelola secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas adalah prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi adalah prinsip dimana untuk melancarkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*), pemerintah harus dapat dikelola secara independen.

5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran atau kesetaraan adalah prinsip dimana dalam melaksanakan kegiatannya, harus senantiasa memperhatikan kepentingan untuk masyarakat dan lingkungannya dan pemangku kepentingan lain harus berdasarkan asa kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip-prinsip *good governance* tersebut dalam akuntansi sektor publik berpegang pada prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik.

2.1.1.3 Manfaat *Good Government Governance*

Penerapan *Good Government Governance* memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintahan daerah, pemerintah pusat padamaupun masyarakat umum. Dengan melaksanakan *Good Governance* menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:39) ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain yaitu :

1. “Meminimalkan *agency cost*,
2. Meningkatkan kinerja pemerintahan,
3. Memperbaiki citra pemerintahan.”

Penjelasan dari beberapa manfaat yang akan diperoleh, adalah sebagai berikut:

1. Meminimalkan *agency cost*

Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.

2. Meningkatkan kinerja pemerintahan

Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan

3. Memperbaiki citra pemerintahan

Citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah di mata masyarakat dan lingkungannya.

Manfaat dari penerapan *good governance* tentunya sangat berpengaruh bagi pemerintahan, dimana manfaat *good governance* ini bukan hanya untuk saat ini tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pendukung kembangnya dalam pemerintahan saat ini. Selain bermanfaat meningkatkan citra pemerintahan di mata masyarakat, hal ini tentunya juga menjadi nilai tambah pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam pemerintah.

2.1.1.4 Tujuan *Good Government Governance*

Tujuan dari *Good Government Governance* menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:40) adalah :

1. “Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan,
2. Aktiva pemerintahan dijaga dengan baik,
3. Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat,
4. Kegiatan pemerintahan dilakukan dengan transparan.”

Penerapan pelaksanaan prinsip *Good Government Governance* secara optimal akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada, dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait. Serta tujuan *good government governance* adalah penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai

tambah bagi semua pihak dalam jangka panjang dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Good Government Governance*

Seperti yang dijelaskan oleh Yuanida (2010) dalam pelaksanaan tugas (*task*) pencapaian *good governance* dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi penerapan *good governnce*, yaitu:

1. “Faktor Manusia Pelaksana (*Man*),
2. Faktor Partisipasi Masyarakat (*public participation*),
3. Faktor Keuangan Daerah (*funding or budgeting*),
4. Faktor Peralatan (*tools*),
5. Faktor Organisasi dan Manajemen (*Organization and management*)”.

Penjelasan dari beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi penerapan *good governnce*, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Manusia Pelaksana (*Man*)

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan *good governance* sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (*local government*) yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD. Di samping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu para pegawai daerah itu sendiri.

2. Faktor Partisipasi Masyarakat (*public participation*)

Keberhasilan penyelenggaraan *good governance* juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat di daerah baik sebagai system maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam system pemerintah daerah. Salah satu wujud dari

rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pencapaian *good government governance* adalah dengan sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Adapun wujud partisipasi aktif masyarakat antara lain:

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (*decision making*);
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan (*actuation participation*);
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (*cost benefit evaluation*);
- d. Partisipasi dalam evaluasi (*evaluation participation*).

3. Faktor Keuangan Daerah (*funding or budgeting*)

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian *good governance* di daerah / lokal membutuhkan dana/finansial.

4. Faktor Peralatan (*tools*)

Faktor peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan pencapaian *good governance*. Dalam pengertian ini peralatan adalah setiap alat atau benda yang dipergunakan untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan gerak dan aktivitas pemerintah dalam upaya pencapaian dan perwujudan *good government governance*.

5. Faktor Organisasi dan Manajemen (*Organization and management*)

Faktor Organisasi dan Manajemen mempengaruhi pelaksanaan *good governance* karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajemen:

POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling). Diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik, agar *good government governance* dapat terwujud.

2.1.2 Akuntabilitas Keuangan

2.1.2.1 Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*. Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengertian Akuntabilitas Menurut Mardiasmo (2009) yaitu :

“Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Adapula penjelasan menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau *Government Accounting Standards Committee (GASC, 2010)* dalam kerangka kerja konseptual GAS, definisi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

"Accountability is the accountability of resource management and policy implementation is entrusted to the reporting entity in achieving the goals set periodically".

Kutipan diatas dapat diartikan bahwa Akuntabilitas adalah akuntabilitas manajemen sumber daya dan implementasi kebijakan dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik.

2.1.2.2. Manfaat Akuntabilitas

Menurut de Asis dalam Khairudin dan Eelanda (2016) menyatakan bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas atau mencegah praktek korupsi salah satunya yaitu meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas diyakini dapat memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi di kalangan elit politik.

Manfaat akuntabilitas upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk Waluyo dalam Albugis (2016) adalah:

1. “Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
2. Mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.”

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009:24) menyatakan bahwa :

1. “Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel,
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh,
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.”

2.1.2.4 Tipe Akuntabilitas

Menurut Ihyaul Ulum (2010:42) mengatakan bahwa :

”Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam tipe, diantaranya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu Akuntabilitas Internal dan Akuntabilitas Eksternal.”

Adapun penjelasan mengenai tipe akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat atau petugas publik baik individu maupun kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

2. Akuntabilitas Eksternal

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.”

2.1.2.5 Jenis Akuntabilitas

Menurut Saleh dan Iqbal (2008: 45), akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia meliputi akuntabilitas intern seseorang dan akuntabilitas ekstern seseorang.

1. Akuntabilitas intern disebut juga akuntabilitas spiritual. Tidak sekedar tidak ada pencurian dan sensibilitas lingkungan, tapi lebih dari itu seperti adanya perasaan malu berbuat melanggar ketentuan dan lain-lain. Ini sangat besar maknanya bila semua orang memiliki sensibilitas spiritual seperti itu, alasan-alasan permisif seperti berbedanya kemampuan, tidak cukup waktu, tidak cukup sumber daya, dan sebagainya merupakan cikal bakal adanya korupsi dan akuntabilitas menjadi seperti kaca mobil berembun alias kabur. Hendaknya kita berusaha keras menghindari keluhan-keluhan semacam itu bila kita ingin melaksanakan akuntabilitas dengan sungguh-sungguh.
2. Akuntabilitas ekstern seseorang adalah akuntabilitas kepada lingkungannya baik formal (atasan) maupun informal (masyarakat). Akuntabilitas ekstern lebih mudah diukur karena norma dan standarnya jelas. Ada atasan, ada pengawas, ada kawan sekerja yang membantu, ada masyarakat konsumen yang sesekali menyoroti dan memberikan koreksi serta saran perbaikan, kelompok mahasiswa yang sensitif terhadap penyimpangan-penyimpangan, dan ada pula lembaga masyarakat penyeimbang yang kepeduliannya sangat tinggi seperti *Indonesian Corruption Watch*, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

2.1.2.6 Definisi Akuntabilitas Keuangan

Menurut Abdul Halim (2008:254), pengertian Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan, sasaran pertanggungjawaban ini berupa laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah”.

Menurut Ihyaul Ulum (2010:41), Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

- 1) “Integritas Keuangan
- 2) Pengungkapan
- 3) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Berikut penjelasan dari pertanggungjawaban Akuntabilitas keuangan :

1. Integritas Keuangan

Integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber- sumbernya. Integritas keuangan harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan

pengungkapan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

2. Pengungkapan

Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,
- b) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,
- c) Undang-undang APBN,
- d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah,
- e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah,
- f) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD,

- g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Adapula pengertian Akuntabilitas keuangan menurut Dewi Indriasih dan Poppy Sofia (2014) adalah sebagai berikut:

“Financial accountability describes the systems and procedures used to keep track of financial and monetary transactions that take place inside an organisation and therefore it is a system of recording, classifying and summarising information for various purposes. financial accountability refers to producing regular financial reports to those with an interest and a right to know, proving that leadership has control over financial decision and accounting for funds by producing documentary proof of receipts and payments.”

Kutipan diatas dapat diartikan bahwa Akuntabilitas keuangan menggambarkan sistem dan prosedur yang digunakan untuk menjaga transaksi keuangan dan moneter yang terjadi di dalam suatu organisasi. Oleh karena itu Akuntabilitas keuangan merupakan sistem pencatatan, pengklasifikasian dan meringkas informasi untuk berbagai keperluan. Pertanggungjawaban keuangan mengacu pada pembuatan laporan keuangan rutin kepada mereka dengan minat dan hak untuk mengetahui, membuktikan bahwa kepemimpinan memiliki kendali atas keputusan keuangan dan akuntansi untuk dana dengan memproduksi bukti bukti pembayaran dan pembayaran dokumen.

Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, informasi tersebut akan tercermin didalam laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban. Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.

2.1.2.7 Ciri-ciri Akuntabilitas Keuangan

Menurut Dadang Sadeli (2008:104) menyatakan ciri-ciri akuntabilitas keuangan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. “Akuntabilitas Keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan,
2. Akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan,
3. Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal,
4. Akuntabilitas keuangan harus dinilai secara objektif dan independen.”

Berikut penjelasan mengenai ciri-ciri akuntabilitas yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program dan aktivitas pemerintahan, apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan

Akuntabilitas keuangan harus berisi pengungkapan penilaian kinerja keuangan dari aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas serta pengungkapan penilaian pencapaian tujuan (*output*) yang telah dibiayai, dengan manfaat yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut (*outcome*).

3. Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal

Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal (*reliable informasi*) karena sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko. Reliabilitas informasi akan tumbuh dengan minimnya tingkat kesalahan penyajian data, tingginya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

4. Akuntabilitas keuangan harus dinilai secara objektif dan independen

Untuk menjamin reliabilitas informasi yang terdapat pada akuntabilitas keuangan perlu adanya pihak ketiga yang melakukan pemeriksaan atas kendalan informasi yang disajikan dalam akuntabilitas. Adanya penilaian yang objektif dan independen atas akuntabilitas keuangan merupakan ciri dari akuntabilitas yang efektif.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Definisi Kinerja

Pengertian Kinerja Keuangan menurut Irham Fahmi (2012:5) adalah sebagai berikut :

“Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *oriented* atau *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu”.

Menurut Indra bastian dalam Irham Fahmi (2012) menjelaskan bahwa :

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu”.

Menurut Nurlaila (2010:71) pengertian kinerja, adalah sebagai berikut:

“Kinerja adalah performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses”

Menurut (Sedarmayanti, 2012:51) bahwa kinerja meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. *Quality of work*, kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.
2. *Promptness*, ketangkasan atau kegesitan pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.
3. *Initiative*, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggungjawabnya.
4. *Capability*, kemampuan individu untuk mengerjakan sebagian tugas dalam suatu pekerjaan baik kemampuan intelektual maupun kemampuan fisik.
5. *Communication*, komunikasi merupakan bagian penting untuk membangun relasi dan menumbuhkan motivasi antar pegawai sehingga terbina suatu kerjasama yang harmonis”.

Dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), pemerintah harus terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh (Sutopo dalam LAN, 2002).

Kinerja pemerintah daerah memiliki arti yang sangat penting bukan saja bagi masyarakat selaku pemilik kedaulatan, dan para donator selaku penyumbang dana, tetapi juga penting bagi Pemerintah Daerah sendiri selaku Eksekutif, terlebih-lebih bagi DPRD yang secara fungsional memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Menurut Chabib Soleh dan Suropto (2011:5) Arti penting kinerja pemerintah daerah di bagi menjadi enam bagian yaitu:

1. “Sebagai umpan balik bagi Kepala Daerah untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang,
2. Untuk menemukembali SKPD mana yang memberikan kontribusi terbesar dan SKPD mana yang kurang dalam memberikan kontribusi terhadap proses pencapaian visi Kepala Daerah serta mengidentifikasi berbagai faktor penyebab keberhasilan dan kekurangberhasilan dari setiap SKPD,
3. Untuk membangkitkan motivasi kerja Kepala SKPD dan jajarannya agar bekerja lebih produktif
4. Untuk merumuskan kembali kebijakan, program dan kegiatan yang dinilai lebih efektif berikut penganggarannya serta metode/teknik pelaksanaan yang lebih efisien dalam proses pencapaian visi,
5. Melalui laporan kinerja, pemerintah daerah meninformasikan tingkat keberhasilan/kegagalannya secara jujur serta menjelaskan berbagai faktor kegagalannya baik kepada masyarakat, kepada para pemberi donasi, kepada DPRD dan kepada pemerintah tingkat di atasnya,
6. Meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, bahwa dana publik yang dipercayakan kepadanya, telah dipergunakan sesuai amanat yang diberikan”.

2.1.3.2 Indikator Kinerja

Menurut Dirjen Otda Djokohermansyah Djohan dalam Marris (2013), indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja pemerintah antara lain adalah sebagai berikut :

1. “Kesejahteraan Masyarakat,
2. *Good Governance*,
3. Pelayanan dasar,
4. Daya saing daerah.”

Berikut penjelasan dari beberapa indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja pemerintah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Indikator Kesejahteraan Masyarakat meliputi indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran

2. *Good Governance*

Pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai bagian dari agenda reformasi dengan tujuan agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Indikator *Good Governance* meliputi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3. Pelayanan dasar

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan dasar meliputi Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum/ penataan ruang, perlindungan masyarakat, sosial

4. Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi, dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Menurut Indra Bastian dalam Dian Annisa (2011), mengemukakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan beberapa indikator diantaranya yaitu:

1. “Masukan (*inputs*),
2. Keluaran (*outputs*),
3. Hasil (*outcomes*),
4. Manfaat (*benefits*),
5. Dampak (*impacts*).”

Berikut penjelasan dari beberapa indikator diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan, untuk menghasilkan keluaran, kebijaksanaan/ peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

2. Indikator keluaran (*output*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau nonfisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja menurut Indra Bastian dalam Dian Annisa (2011) adalah sebagai berikut:

1. “Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
3. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak.
5. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/ penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, data/ informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.”

2.1.3.3 Definisi Kinerja Keuangan

Menurut Sutrisno (2009:53) tentang pengertian kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

“Kinerja Keuangan adalah prestasi yang dicapai perusahaan / pemerintahan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan / pemerintahan tersebut.”

Menurut Irham Fahmi (2012:2) Kinerja Keuangan yaitu :

“Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan / pemerintahan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan / pemerintahan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan suatu perusahaan / pemerintahan, dengan menggunakan peraturan-peraturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar serta mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

Dalam hubungannya dengan kinerja keuangan, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berupa Laporan Keuangan. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja keuangan (Mardiasmo, 2009:21).

Adapun pengertian Laporan Keuangan menurut Mahmudi (2010:12) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi

yang dimiliki oleh suatu entitas. Adapun pengertian Laporan Keuangan menurut ahli adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.

2.1.3.4 Tujuan Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2009:239) tujuan kinerja keuangan adalah:

1. Untuk mengetahui keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan. Dilihat dari aspek kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
2. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan / pemerintahan dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

2.1.3.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan

Menurut Munawir (2010:31) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah:

1. Likuiditas, yang mampu menunjukkan kemampuan suatu pemerintahan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus dipenuhi atau kemampuan pemerintahan untuk memnuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih

2. Solvabilitas, yang mampu menunjukkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila di likuidasi baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang
3. Rentabilitas atau profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan pemerintah untuk menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu.
4. Stabilitas ekonomi, yang menunjukkan kemampuan pemerintahan untuk mempertimbangkan kemampuan pemerintah untuk membayar beban bunga pemerintah dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen secara teratur tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

2.1.3.6 Tahap-Tahap dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2012:3), ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan secara umum, yaitu:

1. “Melakukan *review*,
2. Melakukan perhitungan,
3. Melakukan perbandingan,
4. Melakukan penafsiran (*interpretation*),
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah/ solusi (*solution*)”.

Berikut uraian penjelasan mengenai tahap dalam menganalisis kinerja keuangan secara umum, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan *review*

Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan. *Review* di sini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah di buat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2. Melakukan perhitungan

Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

3. Melakukan perbandingan

Melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan yang telah diperoleh, dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan atau pemerintahan lainnya.

Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua yaitu:

- 1.) *Time series analysis*, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
- 2.) *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antar satu dengan yang lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.

Dari hasil penggunaan metode ini diharapkan nantinya akan dapat dibuat kesimpulan yang menyatakan bahwa perusahaan/pemerintahan tersebut berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang/normal, tidak baik, dan sangat tidak baik.

4. Melakukan penafsiran

Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan/pemerintahan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami.

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah / solusi (*solution*)

Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa pengembangan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Implementasi *Good Government Governance* Terhadap Akuntabilitas Keuangan dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lina Nafidah dan Nur Anisa (2017)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang	Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang telah mencapai akuntabilitas
2.	Wiara Sanchia Grafita Ryana Devi (2016)	Pengaruh Aparatur, Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap <i>Good Government Governance</i> (SKPD Bandung)	1. Kinerja Aparatur berpengaruh signifikan terhadap <i>Good Government Governance</i> 2. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap <i>Good Government Governance</i>
3.	Natak Riswanto (2016)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan daerah kabupaten Jember semakin baik.
4.	Widi Adrian (2015)	Pengaruh Akuntabilitas ditinjau dari konsep <i>good governance</i> terhadap kinerja dinas kesehatan kota Bandung	1. Pelaksanaan akuntabilitas ditinjau dari konsep <i>good governance</i> pada Dinas kesehatan pemerintah kota Bandung sudah baik. 2. Akuntabilitas ditinjau dari konsep <i>goodgovernane</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable kinerja pada Dinas kesehatan Pemerintah kota Bandung.
5.	Randy Adam Kurniawan (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Good Government Governance</i> terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Variabel karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap manajerial

6.	Nurhayati Soleha (2014)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi pada SKPD Kabupaten / Kota Provinsi Banten).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi sistem keuangan daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan 2. Aktivitas pengendalian memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan
7.	Depi Oktia Ruspina (2013)	Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> Pemerintah Pada Pemerintah Kota Padang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif kinerja pemerintah daerah dengan penerapan <i>good corporate governance</i> 2. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan <i>good corporate governance</i> <p>System pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan <i>good corporate governance</i>.</p>
8.	Elvira Zeyn (2011)	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>good governance</i> dan standar akuntansi pemerintahan dengan komitmen yang tinggi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah. 2. Masih terdapat faktor lain yang berpengaruh dalam akuntabilitas.
9.	Kiki Wardani (2010)	Pengaruh Kinerja Aparatur pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap <i>good governance</i> (Studi Kasus pada SKPD di kabupaten Solok).	Kinerja Aparatur Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan <i>good governance</i> dan pengelolaan keuangan daerah juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan <i>good governance</i>

10.	Meitika Yuanida (2010)	Pengaruh implementasi <i>good governance</i> terhadap kinerja Pemerintah	1. faktor-faktor <i>good governance</i> terbukti berpengaruh positif dan signifikan 2. prinsip-prinsip <i>good governance</i> terbukti berpengaruh positif dan signifikan.
11.	Imam Arif Permana (2009)	Pengaruh Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah terhadap kinerja keuangan daerah	1. partisipasi publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah 2. Akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Implementasi *Good Government Governance* Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Menurut Indra Bastian (2011:5) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan, baik keuangan pusat maupun keuangan daerah perlu dilaksanakan secara professional, terbuka, dan bertanggungjawab untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana. Akuntabilitas ini sangatlah penting dalam pemerintahan karena menjadi sorotan utama masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa adanya pemberitahuan dari pemerintah kepada publik/ masyarakat.

Menurut Imam Arif Permana (2009) mengungkapkan bahwa transparansi, dan Akuntabilitas merupakan suatu semangat nilai dari prinsip *Good Government Governance* atau biasa disebut tata kelola pemerintahan yang baik.

Randy Adam Kurniawan (2014) juga mengungkapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) sangatlah berpengaruh terhadap akuntabilitas di pemerintahan.

Menurut Rinaldi (2016) mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah yaitu *good governance*. Pengertian *good governance* itu sendiri adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik.

Menurut Institut Administrasi Publik dalam Dewi Indriasih dan Poppy Sofia (2014) mengatakan bahwa *Accountability is responsibility report to submitted to their respective superiors, the responsibility report describes the performance of the concerned government agencies through the Government Performance Accountability System. Government Performance Accountability Report has long been established as one of the obligations of government agencies both at central and local level, including local work units (SKPD) in good governance.*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Indriasih dan Poppy Sofia (2014) menjelaskan bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban menggambarkan kinerja instansi pemerintah terkait melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah telah lama ditetapkan sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk unit kerja lokal (SKPD) dalam pemerintahan yang baik.

Sehingga dengan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dalam mempertanggung jawabkan keuangan daerah sampai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sebagai suatu bentuk terlaksananya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah atas aktivitas pengelolaan sumber daya politik pemerintah.

2.3.2 Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa akuntabilitas keuangan membutuhkan lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada orang luar dan membutuhkan informasi dalam bentuk akurasi, transparansi, ketepatan waktu, relevansi dan reliabilitas. Akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan keuangan daerah, akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

Akuntabilitas memiliki pengaruh yang relative kuat terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan penyelenggaraan akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa adanya pemberitahuan pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan dana masyarakat. Menurut Aheruddin (2008)

menyatakan bahwa dengan diterapkannya akuntabilitas maka akan menghasilkan keuangan daerah yang baik yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah baik secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dan akuntabilitas keuangan merupakan keuangan tertinggi dari pelaporan keuangan pemerintah.

Menurut Elvira Zeyn (2011) mengungkapkan bahwa salah satu akuntabilitas publik adalah akuntabilitas keuangan (*financial*) dimana mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar. Laporan keuangan juga merupakan salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan kata lain, akuntabilitas terkandung kewajiban menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan daerah ke dalam laporan keuangan daerah. Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dalam menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan daerah ke dalam laporan keuangan daerah, baik sebagai bahan evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah daerah maupun sebagai gambaran kinerja keuangan atas laporan keuangan pemerintahan. pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari keuangan pemerintah daerah, anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Adapula penjelasan Menurut Konsep *Government Accounting Standards Board Concept (GASB)* dalam Dewi Indriasih dan Poppy Sofia (2014) menyatakan bahwa *Accountability is the basis of financial reporting in government and financial Accountability is the highest goal of government financial reporting. Accountability is to provide information on activities and financial performance to stakeholders.*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dewi Indriasih dan Poppy Sofia (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah dasar pelaporan keuangan di pemerintah dan Akuntabilitas keuangan merupakan tujuan tertinggi dari pelaporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas adalah sebagai penyediaan informasi pada kegiatan dan kinerja keuangan kepada pihak-pihak terkait.

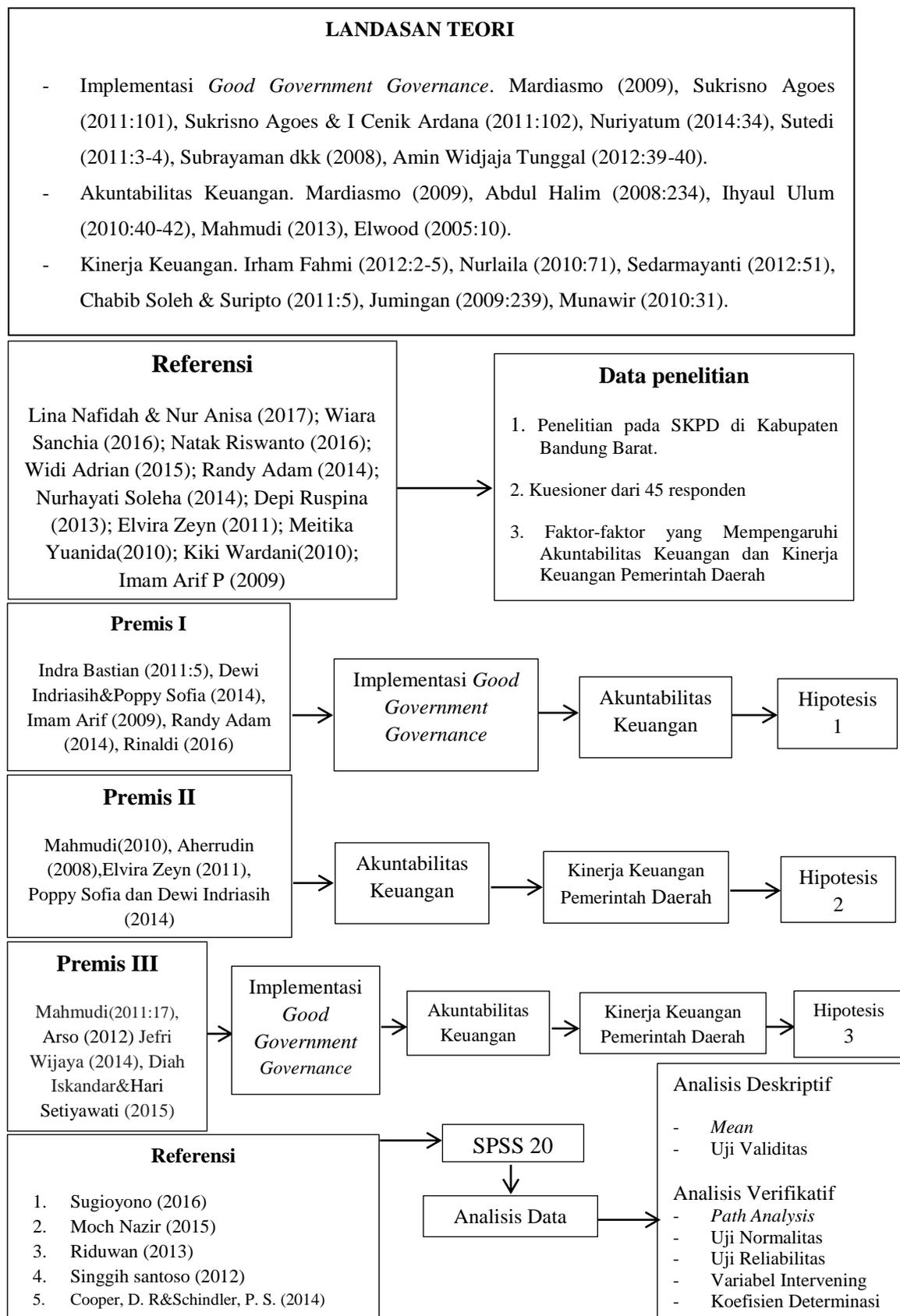
2.3.3 Pengaruh Implementasi *Good Government Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2011:17) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik memiliki peran strategik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) baik melalui perwujudan transparansi, akuntabilitas, dan upaya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Menurut Arso (2012) dalam Jefri Wijaya (2014) mengungkapkan bahwa Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), telah mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas salah satunya yaitu pada akuntabilitas keuangan.

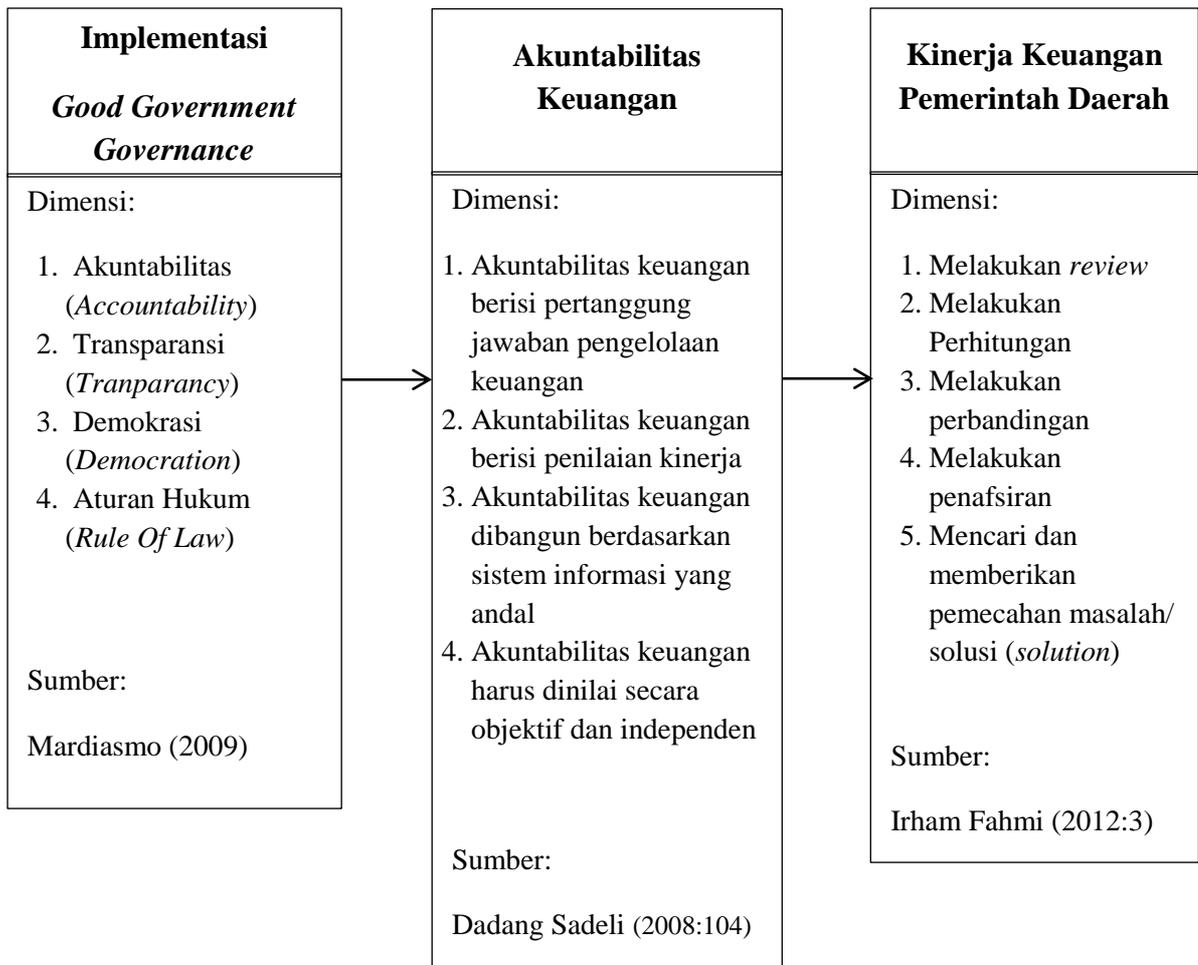
Keberhasilan keuangan daerah mempunyai dampak efisien dan efektif langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan berpengaruh besar dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).

Sedangkan Menurut Diah Iskandar dan Hari Setiyawati (2015) menyatakan bahwa *Implementation of Public Sector Accounting and quality control of government financial reports will affect the accountability and financial performance of the government in realizing good governance. Public sector accounting for financial accountability requires public institutions to make financial reports to describe the organization's financial performance to outsiders.*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diah Iskandar dan Hari Setiyawati (2015) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akuntansi sektor publik dan pengendalian kualitas laporan keuangan pemerintah dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah yang baik.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2

Paradigma Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka langkah selanjutnya penulis mencoba mengemukakan sebuah hipotesis.

Sugiyono (2014:93) berpendapat bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang disajikan penulis adalah sebagai berikut:

- H₁ : Terdapat pengaruh Implementasi *Good Government Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan.
- H₂ : Terdapat pengaruh Akuntabilitas Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- H₃ : Terdapat pengaruh Implementasi *Good Government Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan dan dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

